

**DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**



**Disusun oleh:
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2018**

**DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**



**Mengetahui
Direktur Utama**

**dr.H.Heru Effendi,Sp.KJ
NIP. 19591220 198910 1 001**

**Sungailiat, 2018
Ketua Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas**

**Drs.Zulhair,MM
NIP. 19611012 198203 1 007**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara kongret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Pendidikan Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilaya Birokrasi bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membaagun Zona Untegritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

4. pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
6. Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Dalam hal ini adalah Bidang pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah pimpinan tertinggi pada Organisasi
9. Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM. Dalam hal ini adalah Tim Penilai Internal (TPI) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Tim Penggerak Integritas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan pencegahan korupsi. Dalam hal ini adalah Tim Penggerak Integritas internal pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Perencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Perancangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ Pernyataan dari Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Perancangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kepala Dinas, pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkup Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menandatangani Lembar Komitmen.
3. Perancangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas melalui website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perancangan yang telah dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI Terbentuknya Tim Kerja ZI	SOP Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas SK. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Maret – April 2018
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2018, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui website	Dokumen rencana kerja kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di website Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov.Kep. Bangka Belitung	Januari – Juni 2018
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per triwulan	Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 3 bulan sekali, Tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut Monev sebelumnya	April – Oktober 2018
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Daftar hadir Direktur Utama	2018
		Agen perubahan sudah ditetapkan	Menyusun SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; Menetapkan SK Tim Agen perubahan	SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; SK Tim Agen Perubahan	Januari – Juli 2018
		Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun di lingkungan organisasi	Pengarahan Direktur Utama untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, apel, dan pengarahan setelah senam pagi	Daftar Hadir Rapat; Notulen; Usulan dan Nota Dinas	Setiap ada pertemuan pada 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Penandatanganan Lembar Komitmen Pembangunan Zona Integritas	Lembar Komitmen Pembangunan Zona Integritas yang telah ditandatangani seluruh personil di lingkup Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Januari – Juni 2018
II.	PENATAAN TATALAKSANA				
1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dipahami	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SOP yang telah ada	Dokumen SOP Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Januari – Desember 2018
2	E-Office(2)	Operasionalisasi manajemen SDM Sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan SIMPEG pada manajemen kepegawaian, Penggunaan WA grup untuk komunikasi internal	Aplikasi SIMPEG, WA grup Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov.Kep. Bangka Belitung	Januari – Desember 2018
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan website untuk publikasi informasi kepada masyarakat luas	Website resmi RSJD Prov.Kep.Babel yang diperbarui secara rutin	Januari – Desember 2018
3	Keterbukaan informasi publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan pemohon informasi, Penyediaan kotak pengaduan/saran dan pengaduan melalui website serta email resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov.Kep. Bangka Belitung	Arsip formulir pemohon informasi publik / data, kotak pengaduan/ saran, pengaduan melalui website dan email resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov.Kep. Bangka Belitung	Januari – Desember 2018
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan di evaluasi secara berkala	Mengevaluasi dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekali dalam setahun	Dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Januari – Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai ANJAB dan ABK kemudian mengajukan ke BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen analisa kebutuhan pegawai sesuai ANJAB dan ABK, tanda terima penyerahan dokumen ke BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Januari – Desember 2018
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai Non PNS, melakukan rekrutmen dan menempatkannya sesuai kebutuhan	Dokumen analisa kebutuhan pegawai Non PNS,	Januari – Desember 2018
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kinerja	Membuat Analisa SKP	Dokumen Analisa SKP	Januari – Desember 2018
2	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Analisa SDM sesuai kompetensi	Laporan analisa SDM sesuai Kompetensi	Januari – Desember 2018
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Menyusun Prosedur Mutasi Internal	Dokumen Prosedur Mutasi Internal	Januari – Desember 2018
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari – Desember 2018
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Menganggarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan	Surat penajuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ke BKPSDM Prov.Kep.Babel, Tanda terima surat ke BKPSDM Prov.Kep.Babel	Januari – Desember 2018
		Monev Kegiatan Pengembangan Profesi	Membuat laporan kegiatan pengembangan profesi	Laporan Kegiatan Pengembangan Profesi	Januari – Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian SKP tahunan, DUPAK fungsional	SKP tahun 2017	Januari – Desember 2018
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP struktural	SKP Struktural 2017	Januari – Desember 2018
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Penilaian DUPAK Fungsional tertentu per semester	DUPAK Fungsional tertentu	Januari – Desember 2018
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward(pengembangan karir individu, penghargaan,dll)	Melaksanakan Penilaian Pegawai Teladan, Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	Dokumen penetapan pegawai teladan	Januari – Desember 2018
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Daftar nama pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Januari – Desember 2018
6	Sistem Informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG	SIMPEG dilakukan setiap kali ada perubahan	Januari – Desember 2018
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Direktur Utama memberikan pengarah dan mengesahkan Rencana Kerja Tahun 2018	Lembar pengesahan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 dan 2019	April 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Direktur Utama terlibat dan mengesahkan dokumen matrik reuiu RENSTRA dan Perjanjian Kinerja	Lembar pengesahan dokumen matrik reuiu RENSTRA 2017-2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Utama Tahun 2018 beserta	Januari – Desember 2018
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap 6 bulan sekali	Form laporan evaluasi rencana kerja 2018	Januari – Desember 2018
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun dokumen Renstra, matrik reuiu Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	Dokumen Rensta 2017-2022, matrik reuiu Renstra 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2018 beserta perubahannya	Januari – Desember 2018
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun dokumen Renstra, matrik reuiu Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	Dokumen Rensta 2017-2022, matrik reuiu Renstra 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2018 beserta perubahannya	Januari – Desember 2018
		Terdapat indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun Indikator Kinerja Utama	Dokumen Indikator Kinerja Utama	Januari – Desember 2018
		Indikator kinerja telah SMART	Melakukan reuiu terhadap dokumen Renstra	Matrik Reuiu Renstra	Januari – Desember 2018
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Tahun 2017, Surat Pengantar Pemberian	Januari – Desember 2018
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Tahun 2017	Januari – Desember 2018
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP dengan mengikuti Pelatihan	Penyusunan LAKIP 2017, Dokumentasi pelaksanaan penyusunan LAKIP 2017, Sertifikat Pelatihan Lakip	Januari – Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun SK Penyusun LAKIP	Sk Penyusunan LAKIP	Februari 2018
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang standing banner tentang gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mensosialisasikan gratifikasi via website, bekerja sama dengan KPK melaksanakan kegiatan anti korupsi	Dokumentasi standing banner tentang gratifikasi yang terpasang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Informasi tentang gratifikasi pada website, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Kegiatan Anti Korupsi, Dokumentasi kegiatan Anti Korupsi	Januari - Desember 2018
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi	Laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi	Januari - Desember 2018
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Melaksanakan rapat internal sewaktu waktu sebagai sarana pengendalian internal	Daftar hadir rapat, notula hasil Rapat	Januari - Desember 2018
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan rapat internal sewaktu Waktu	Daftar hadir rapat, notula hasil Rapat	Januari - Desember 2018
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melaksanakan rapat internal sewaktu Waktu	Daftar hadir rapat, notula hasil Rapat	Januari - Desember 2018
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi terkait dengan SPI kepada seluruh pegawai	Daftar hadir rapat, notula hasil Rapat	Januari - Desember 2018
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah Diimplemetasikan	Penyediaan kotak pengaduan/saran dan pengaduan melalui website serta email resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumentasi kotak pengaduan/saran, pengaduan melalui website dan email resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Januari - Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan mempublikasikan	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website	Januari - Desember 2018
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Januari - Desember 2018
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website	Januari - Desember 2018
4	Whistle Blowing System	<i>Whistleblowing system</i> sudah diimplementasikan	Whistleblower di lingkungan instansi, Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan, Mensosialisasikan pelaksanaan whistle blower system	Dokumen pedoman pelaksanaan whistleblower, SK pengelola WBS, Daftar hadir sosialisasi, Notula hasil sosialisasi	2019
		Evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> sudah dilakukan	Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana aksi terhadap pelaksanaan WBS 6 bulan sekali	Laporan monitoring dan evaluasi serta rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS	Januari - Desember 2018
		Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS 6 bulan sekali	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS	Januari - Desember 2018
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi mengacu pada PerMenPAN dan RB no 37/2012; Pembentukan tim Penanganan benturan kepentingan	Pedoman penanganan benturan kepentingan; SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Januari - Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkup Dinas Pendidikan	Daftar hadir sosialisasi, notula hasil sosialisasi	Januari - Desember 2018
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun matrik implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Matrik implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Januari - Desember 2018
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari - Desember 2018
		Hasil evakuasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari - Desember 2018
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun dokumen standar pelayanan publik	SK Penetapan Dokumen Standar pelayanan	Januari - Desember 2018
		Standar pelayanan telah di maklumatkan	Menyusun Maklumat pelayanan, Mensosialisasikan maklumat pelayanan via website, memasang maklumat pelayanan di resepsionis	Maklumat standar pelayanan, Maklumat tercantum di website dan di resepsionis	Januari - Desember 2018
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Tersedia dokumen SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Dokumen SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Januari - Desember 2018
		Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen SPP beserta SOP pelaksana	Laporan kaji ulang SPP, Perbaikan SOP pelaksana	Januari - Desember
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Kepala Balai pada rapat, apel, atau setelah senam pagi	Daftar hadir, notulen	Januari - Desember 2018

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan publik diupload di website Dinas Pendidikan	Screenshot website	Januari - Desember 2018
		Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/ reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Melakukan pemetaan pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Matrik pemetaan pemberian sanksi/ reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Januari - Desember 2018
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	-	-	
		Terdapat inovasi pelayanan	Penjangkauan Pasung di Wilayah Bangka Belitung	Dokumentasi	Januari - Desember 2018
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat 2016	Januari - Desember 2018
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat pada website Dinas Pendidikan	Screenshot dari website	Januari - Desember 2018
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menyusun laporan analisa dan rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Dokumen laporan analisa dan rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Januari - Desember 2018

BAB IV

PENUTUP

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit didalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IKM di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan didalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zore tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Lampiran 1

Lampiran 1

**DOKUMEN PROGRAM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2018**

No	Target Prioritas
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tindaklanjut hasil monitoring evaluasi.
6	Pelaksanaan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin an profesionalisme pegawai
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendali Internal
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan Keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas